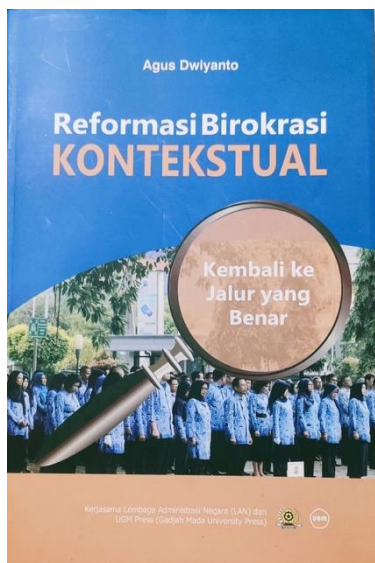


Judul Buku : Reformasi Birokrasi Kontekstual
 Penulis : Agus Dwiyanto
 Penerbit : Gajah Mada University Press
 Tahun Terbit : 2015
 : 2 (Kedua)
 Jumlah Halaman : 307
 Isbn : 978-979-420-981-3
 Peresensi : Bambang Kurniawan,S.Sos.,M.Si (Widyaiswara Madya BKPSDM Kota Tangerang)

Reformasi Birokrasi Kontekstual



Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) saat ini telah menjadi sebuah gerakan yang cukup massif dalam upaya mewujudkan kinerja birokrasi pemerintahan Republik Indonesia yang mampu menjawab berbagai macam tantangan zaman, yang dirasa saat ini kian membutuhkan performance sebuah birokrasi yang *agile* dan *responsive* akan tetapi juga humanis serta egaliter. Namun demikian perubahan kinerja birokrasi pemerintah baik dipusat maupun di daerah masih membutuhkan inovasi dan role model yang lebih baik lagi. Saat ini perubahan masih banyak disampaikan dalam bentuk penerapan absensi pegawai menggunakan aplikasi teknologi digital, yang kemudian dapat mempengaruhi pada pendapatan tunjangan kinerja para pegawai pemerintahan tersebut.

Salah satu isu mendasar dari Reformasi Birokrasi adalah tentang upaya mewujudkan sosok birokrat dan organisasi birokrasi yang mampu mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat. Pemerintah sampai saat ini masih “membiarkan” birokrasi dan pegawainya dibentuk oleh sejarah dan warisan colonial, kultur priyayi dan kekuasaan yang selama ini mengakar sangat kuat dalam birokrasi, dinamika politik local, dan kepentingan sempit dari elit dan pegawai itu sendiri. Kebebasan berekspresi pegawai dimata pimpinan adalah sebuah alasan yang senantiasa dipendam jika tidak ingin tahta kekuasaannya di cabut oleh sang pemimpin elit birokrasi tersebut. Kepentingan sesaat yang hanya mempertahankan sebuah jabatan dan kewenangan menjadi barang mahal yang harus diperjuangkan mati-matian walaupun sesungguhnya bertentangan dengan nurannya. Jika memang demikian keadaannya maka ide dan gagasan serta kebebasan berpendapat akan menjadi mati perlahan-lahan.

Reformasi Birokrasi Kontekstual (RBN) harus mampu membentuk birokrasi pemerintah yang mampu memberdayakan warganya, sehingga mampu bersaing pada tingkat regional, bahkan internasional. Selain juga mampu membuat masyarakatnya memiliki harapan-harapan dalam memulai hidupnya.

Memberikan pelayanan yang baik dan mampu juga menjawab berbagai macam permasalahan yang ada di masyarakat.

Buku “Reformasi Birokrasi Kontekstual” karya Agus Dwiyanto, adalah sebuah buku yang hadir pada saat yang tepat dimana para pemimpin organisasi pemerintahan bahkan pemerhati dunia birokrasi di Indonesia membutuhkan semacam wawasan yang dapat membawa mereka menjelajahi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam dunia birokrasi Indonesia yang menghadapi situasi VUCA ini (Volatility, Uncertainty, collaborative, dan ambiguity). Oleh sebab itu buku ini dilengkapi juga dengan materi seperti birokrasi pemerintahan sebagai instrument pengendalian korupsi, kemudian juga materi mengelola kebijakan reformasi Birokrasi, dan Reformasi mental para birokratnya.

Penulis berpendapat bahwa mengelola gerakan reformasi birokrasi bukanlah hanya mengelola kinerja pegawai dari sisi absensi dan remunerasi saja akan tetapi hendaknya tetap focus pada perubahan mendasar pada aspek-aspek seperti : penataan struktur kelembagaan, perubahan budaya kinerja organisasi, perubahan ukuran kinerja, dan melakukan reformasi pada aspek-aspek ini menuntut pemerintah untuk dapat berani mengambil banyak resiko dan mengelola dampak yang mungkin muncul sebagai akibat dari pergeseran-pergeseran budaya kerja organisasi dan prinsip-prinsip kerja birokrasi yang baru. Tidak ada reformasi tanpa resiko.

Agus Dwiyanto menunjukkan bagaimana setiap perubahan dalam tubuh birokrasi pasti berpotensi menimbulkan resiko, sekecil apapun resiko tersebut harus dihadapi dan bukan malah terkesan dihindari atau kabur dari realitasnya. Resistensi dari para birokrat yang sudah cukup senior akan perubahan yang sedang terjadi juga menjadi tantangan tersendiri. Akan tetapi bagaimanapun tingkat resistensi yang dihadapi, reformasi birokrasi harus tetap dijalani sebagai sebuah tanggungjawab pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Bagian pertama buku ini menguraikan mengenai Birokrasi Weberian, Birokratisasi dan Kinerja, kontroversi tentang penerapan birokrasi ala Weberian dalam pemerintahan sudah lama berkembang, bahkan menjadi polemic di kalangan praktisi. Namun demikian pandangan ini tidaklah terlalu penting menurut penulis jika kita tidak sungguh-sungguh menerapkan perubahan itu sendiri. Kritik terhadap Birokrasi Weberian lebih banyak diarahkana pada pembentukan struktur birokrasi yang mekanis, yang menurut weber jenis birokrasi semacam ini akan mampu melakukan efisiensi dan rasionalitas dalam penyelenggaraan organisasi birokrasi. Walaupun di sisi lain weber juga sesungguhnya menyadari bahwa ada kelemahan dalam birokrasi modelnya ini. Weber dalam banyak kesempatan juga sering mengatakan bahwa birokrasi modelnya disebut sebagai model birokrasi yang ideal. Kecendrungan yang harus di cermati sejak awal dari konsep birokrasi weber ini adalah khususnya dari sisi impersonal dan formal adalah dapat mengabaikan perhatian organisasi itu terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam suatu organisasi. Indonesia juga dalam awal perkembangannya banyak menggunakan model birokrasi tupe

idealnya dari weber. Namun demikian kemudian melakukan perubahan-perubahan disana-sini khususnya saat memasuki fase perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat.

Buku ini memberikan pandangan yang luas tentang bagaimana Birokrasi sebagai sebuah entitas perlu terus melakukan perubahan-perubahan inovatif dan berani khususnya dalam membangun komitmen integritas, akuntabilitas dan profesionalitas nya. Dalam buku ini dijelaskan pula bahwa untuk mempercepat terwujudnya aparatur negara yang memiliki integritas tinggi dan memiliki predisposisi positif terhadap *democratic governance* maka akuntabilitas public menjadi sebuah keniscayaan. Untuk mewujudkan itu semua maka efektivitas pengendalian korupsi dalam birokrasi pemerintah harus menjadi prioritas utama. Para Pemimpin memiliki peran besar dalam memberikan arahan sekaligus *role model* dalam mengembangkan gaya hidupnya (*life style*). Gaya hidup yang dimaksud disini adalah bagaimana setiap aparatur birokrat harus mampu memberikan contoh hidup yang sederhana dan sangat peka terhadap segala persoalan yang dialami rakyatnya. Implikasi dari realitas yang ada saat ini dimana tindak pidana korupsi masih saja marak terjadi adalah pengendalian korupsi yang harus benar-benar ditegakkan dan “tidak pandang bulu.” Selama carut-marut dalam birokrasi belum dapat dibenahi maka peluang untuk berburu rente akan selalu terbuka. Pemberantasan korupsi oleh sebab itu memerlukan tindakan yang koheren dan terintegrasi dengan reformasi birokrasi kita.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menutup pasar korupsi dalam birokrasi adalah pelembagaan *code of conduct* yang mengharamkan berbagai tindakan berburu rente, pengembangan system kepatuhan internal yang efektif, serta pemberian otoritas kepada satuan birokrasi untuk mendisiplinkan aparatur yang terbukti melanggar *code of conduct*. Selain itu upaya lain yang juga bisa ditempuh adalah kerja-kerja transparan, kepastian pelayanan public, dan pemberian sanksi keras terhadap tindakan penyuapan aparatur birokrasi dapat juga menjadi cara yang efektif untuk menekan permintaan memperoleh perlakuan istimewa dari aparatur birokrasi.

Salah satu keunggulan buku ini adalah bahasa yang mudah dipahami dan dapat diaplikasikan langsung dalam dunia birokrasi di Indonesia. Buku ini juga menghadirkan pandangan yang menyeluruh tentang pentingnya reformasi birokrasi nasional itu dilakukan, mengembangkan kepemimpinan inovatif dan membangun tubuh birokrasi yang lebih transparan, akuntabel dan profesional dengan didukung oleh integritas para aparturnya. Agus juga menyampaikan bahwa Reformasi Birokrasi membutuhkan budaya baru dan system nilai baru yang mampu memberikan petunjuk kepada aparat birokrasi tentang bagaimana mereka harus bertindak ketika mereka berinteraksi dengan rakyatnya. Pada sisi lain Agus juga menyampaikan perlunya peran ganda dimainkan oleh para aparatur birokrasi di Indonesia, bahwa dirinya bukan lagi hanya memosisikan diri sebagai aparatur pelayanan masyarakatnya akan tetapi juga mereka harus peduli dan perhatian terhadap rakyatnya, bahkan birokrasi harus mampu mengambil peran empowering dan enabling ketika berhubungan dengan rakyatnya yang termarginalkan. Gagasan yang

disampaikan oleh Agus adalah mewujudkan peran serving, empowering, dan enabling yang harus melekat pada sosok birokrasi Indonesia serta tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari.

Agus Dwiyanto adalah guru besar di Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik FISIP Universitas Gajah Mada (UGM). Sejak Juli 2012 ia dipercaya menjadi Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI). Beberapa Jabatan di kampus tercintanya juga pernah ia duduki, seperti Ketua Jurusan Administrasi Negara, Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, dan Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Usaha. Melalui posisinya ini, Agus Dwiyanto banyak memberikan kontribusi bagi pengembangan kompetensi di dunia Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya semenjak beliau menduduki Jabatan sebagai Kepala LAN-RI. Banyak buku yang telah disusun oleh Agus Dwiyanto, seperti Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi, Manajemen Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, dan Mewujudkan Good Governemnet melalui Pelayanan Publik. Terkait dengan latar belakang pendidikannya, Agus Dwiyanto mendapatkan gelar sarjananya di UGM, kemudian melanjutkan studi studinya di Universiy of Southern California. Tahun 1990 ia kembali mengajar di almaternya di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP UGM.